

PENDIDIKAN BAGI KELOMPOK MARGINAL DI PERKOTAAN

Tohirin el'Ashry

Pengamat Pendidikan, Alumni Universitas Islam Negeri Jakarta

In the development of national community, some of them isolated. They were poor society in the city. Means of education brought them release from the suffering and change their condition. The liberation concept of education would be offering solution for escape from this discriminatory phenomena. They must be taught to escape from this condition by the concept.

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan menjadi faktor yang sangat *urgen* di dalamnya. Jika sekarang kita menatap bangsa ini dililit oleh segudang problematika, baik yang menyangkut persoalan ekonomi, politik, maupun problematika sosial lainnya, maka kita dapat carikan sumber penye-

babnya pada masalah pendidikan. Pendidikan menjadi titik berangkat (*starting point*) untuk masalah-masalah berikutnya.

Ada yang mengatakan bahwa sumber dari semua itu adalah faktor ekonomi. Pendapat ini tentu sangat relevan jika dilihat dari kacamata Marxian dimana teori materialisme historisnya bersandar penuh pada faktor ini. Ada juga yang mengata-

kan bahwa sumber bencana di negeri ini adalah masalah politik. Terjadinya krisis di negeri ini sejak 1997 dikarenakan oleh carut-marutnya masalah politik. Silat lidah dan perselisihan politik antar elit menjadi penyebab utama bobroknya bangsa ini.

Berbagai pendapat terkait dengan persoalan ini tentu sah-sah saja. Tapi menurut hemat penulis, semua problematika itu bersumber dari dua hal saja; kemiskinan dan pendidikan. Dua hal ini satu sama lain saling berkaitan dan berjalinkelindan (*take and give*). Dus, kalau mau dikerucutkan lagi, maka faktor utamanya tiada lain adalah pendidikan sebagaimana telah penulis sebut di awal. Ia merupakan faktor determinan yang menjadi biang kerok semua persoalan yang ada di negeri ini.

B. Urgensi Pendidikan Dalam Ranah Kehidupan

Tak disangsikan lagi bahwa peran pendidikan sangat penting dalam kehidupan. Jauh-jauh hari sebelumnya sejak ratusan tahun silam Nabi Muhammad saw, telah memberikan *warning* tentang hal itu. Dalam sebuah hadis yang sudah sangat familiar di kalangan kaum muslimin beliau bersabda yang

artinya; “*mencari ilmu hukumnya fardlu bagi setiap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. (H.R. Bukhari Muslim).*”

Dalam hadits ini ditegaskan dengan gamblang bahwa mencari ilmu hukumnya fardlu bagi “setiap” orang Islam (baca: *fardlu ‘ain*). Betapa ini sebuah asas yang sangat jelas bahwa masalah pendidikan (baca: ilmu) menjadi faktor fundamental dalam ajaran Islam. Sampai-sampai Nabi pernah menjadikan “wajib mengajar” sebagai tebusan perang. Setiap tawanan yang mempunyai kapasitas keilmuan diwajibkan mengajarkan keilmuannya kepada kaum muslimin sebelum ia dibebaskan. Dari sini kelihatan betapa Nabi sangat *concern* terhadap masalah pendidikan.

Sampai kapan kita diwajibkan belajar? Dalam tradisi pesantren kita sangat akrab dengan istilah “*min al-mahdi ila al-lahdi*” yang dapat penulis terjemahkan secara bebas sebagai, “belajar sepanjang hayat” atau dengan istilah *long life education*. Visi belajar yang tak mengenal waktu ini adalah prinsip yang sangat progresif. Ia adalah sebuah spirit yang mengharuskan manusia untuk memasuki setiap perubahan sejarah secara elastis dan kontekstual dengan mengedepankan penguasaan di bidang ilmu pengetahuan.

Tak pelak lagi bahwa pendidikan menjadi kebutuhan yang

sangat krusial bagi setiap individu. Arus perkembangan dunia yang semakin positivis memaksa setiap pelaku sejarah untuk mengikutinya dengan penguasaan sejumlah kemampuan jika ia tak mau tergusur dari percaturan kehidupan. Sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan (baca:ilmu) telah menjadi penentu maju mundurnya peradaban. Keberhasilan dakwah Nabi pada ratusan tahun silam adalah dikarenakan beliau telah berhasil mengentaskan bangsa Arab dari kebodohan (*jahiliyyah*). Mengangkat mereka dari kegelapan mitos menuju pencerahan ilmu pengetahuan (*min az-zulumaat ila an-nuur*).

Kemajuan peradaban Islam pada periode keempat pada masa kekuasaan Abasiah ditopang oleh adanya proyek penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu juga lahir sederetan tokoh kenamaan yang kapasitas ilmunya sangat diperhitungkan. Diantaranya adalah imam mazhab yang empat (*a'immah al-arba'ah al-mjtabiddiin*).¹

Pencerahan di Eropa (*renaissance*) pada abad ke-17 juga diawali oleh

gerakan keilmuan terutama hasil mengutip dari karya-karya Ibnu Rusyd.² Singkat cerita, setiap perubahan selalu ditandai dengan munculnya kaum cerdik cendikia di masanya. Mereka adalah—meminjam bahasanya Antonio Gramsci—para intelektual organik yang membawa pencerahan bagi bangsanya. Bahkan bagi seluruh umat manusia.

C. Hakikat Belajar dan Problem Formalisasi Pendidikan

Belajar pada hakikatnya (baca: dalam tataran filosofis) adalah usaha terus-menerus untuk memperbaiki diri, lingkungan sekitar, maupun masyarakat secara luas. Dengan pemaknaan ini, belajar lebih dekat kepada “proses”. Ia tak mengenal batas waktu, tempat, dan usia. Ia juga tak sebatas kegiatan-kegiatan spesifik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dilaksanakan di tempat-tempat yang khusus yang bernama sekolah, kampus, madrasah, atau pun institusi-institusi lain.

¹ lihat Hudhari Bik, *Taariikh at-Tasyri' al-Islaami*, terj. Drs. Mohammad Zuhri dalam, *Taariikh at-Tasyri' al-Islaami*, (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), (Indonesia, Darul Ikhya) tth.

² Ibnu Rusyd adalah tokoh penting yang menguasai percaturan keagamaan dan filsafat pada abad ke-12. Ia lahir di Cordova pada tahun 1126 M., keluarga terpandang (*qadhil hakim*).

Belajar dalam arti inilah yang kiranya sejalan dengan prinsip, *min al-mahdi ila al-lahdi*. Prinsip ini senada dengan apa yang menurut Prof. Proopert Lodge, seorang pakar pendidikan kontemporer. Menurut-nya, “*live is education and education is live*”, yang dapat diterjemahkan dengan, “hidup ini adalah proses pendidikan dan pendidikan itu sendiri adalah kehidupan”.

Pemaknaan pendidikan dalam tataran filosofis ini—menurut hemat penulis—sejalan dengan filosofi yang terkandung dalam kalimat “Iqra”-nya surat al-‘Alaq. Yakni proses membaca realitas, menghayatinya, kemudian memetik hikmah darinya untuk menjalani kehidupan pada taraf yang lebih baik. Hal terakhir inilah yang direkomendasikan dalam sebuah hadis Nabi bahwa hari ini seharusnya lebih baik dari kemarin. Dan esok harus lebih baik dari sekarang. Pendek kata, makin hari makin bertambah baik. Orang seperti inilah yang dikatakan sebagai orang yang beruntung (*fabwa raabih*).

Pada tahap selanjutnya, belajar identik dengan aktifitas-aktifitas seperti membaca (*qira’ah*), menulis (*kithabah*), mendengarkan (*istima’*), mentela’ah (*muthala’ah*), menter-

jamah (*tarjamah*), dan sebagainya.³ Pada tahap ini belajar sudah masuk ke dalam katagori-katagori metodis dengan mengambil bentuk-bentuk kegiatan tertentu. Sampai di sini kita belum melihat permasalahan yang serius terkait dengan proses belajar-mengajar. Meskipun belajar pada tahap ini sudah mensyaratkan katagori-katagori tertentu seperti, dapat membaca, dapat menulis, dan mau mengulang-ulang (*muthala’ah*) bagian yang kiranya belum dipahami. Ketiga hal inilah yang kiranya dapat penulis sebut sebagai syarat untuk menjadi “*wong pinter*” (orang pandai). Hanya dengan modal ketiga hal ini seseorang bisa belajar dengan sendirinya (otodidak).

Giliran berikutnya, seiring dengan bergulirnya roda sejarah yang semakin modern, pendidikan mengalami proses-proses sistematisasi dan aturan-aturan tertentu. Seperti adanya prosedur-prosedur formal sebelum mengikutinya (baca:pendaftaran), adanya sistem nilai, kurikulum, kode etik, batasan waktu dalam setiap jenjangnya, dan yang pasti harus ada biaya. Pada tataran ini agaknya belajar menjadi sosok yang tidak sesederhana konsep filosofisnya. Hal ini agaknya sejalan dengan komentar sahabat Ali r.a., dalam sebuah sya’ir; *ala laa*

³ Sebagaimana menurut Mua’rif dalam bukunya, *Wacana Pendidikan Kritis: Menelanjangi Problematika, Meretas Masa Depan Pendidikan kita*, (Jakarta, IRCISoD), 2005, Cet. 1.

tanaalu al-'ilma illa bisittatin/saunbiika 'an majmu'ibaa bi bayaani/dzukaain, wa khirshin, wa ishtibaarin, wa bulghatiim, wa irsyaaadi ustadin, wa tuuli zamani (ingatlah, kau tak dapat meraih ilmu pengetahuan kecuali memenuhi enam syarat. Semuanya akan kusampaikan padamu dengan jelas. Yaitu, cerdas, sabar, bersemangat, ada biaya, ada guru pembimbing, dan melewati waktu yang relatif lama).⁴

Penulis hanya akan mengutip dua hal saja yang menurut hemat penulis *compatible* dengan pembahasan ini. Pertama, adanya biaya (*bulghab*). Ini sebenarnya adalah syarat yang wajar dimana seorang pencari ilmu (*thaalib al'ilm*) dituntut untuk memenuhi beberapa kebutuhannya dalam proses belajar yang mana hal itu tak bisa lepas dari urusan biaya (*bulghab/financial*). Hal ini sejalan dengan adagium Jawa; *Jer basuki mowo beo* yang dapat penulis terjemahkan sebagai, “setiap sesuatu pasti butuh pengorbanan”.

Tapi ironisnya, urusan yang satu ini (baca: biaya) sering diselewengkan oleh para pihak penyelenggara pendidikan untuk menekan murid (*thaalib al'ilm*) agar membayar ongkos belajar dengan biaya yang mahal. “Ilmu itu mahal, Bung!” Begitu katanya. Biaya pendidikan bukan lagi sekedar biaya operasional dan honorarium sewajarnya untuk sang guru. Tapi melambungnya biaya tersebut sudah masuk katagori mencekek leher murid. Di sini terjadi—mengutip Marx⁵—akumulasi nilai surplus berupa penumpukan keuntungan finansial bagi sang guru/penyelenggara pendidikan.

Relasi antara guru dan murid sebagaimana relasi antara kapital (pemodal) dan kaum ploretar (kaum buruh). Antara pihak yang mengeksploitasi dan yang dieksploitasi. Penyelenggara pendidikan menggunakan prinsip ekonomi Adam Smith;⁶ “dengan modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya”.

⁴ Syekh az-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*, terj. Drs. H. Aliy As'ad, *Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan*, (Kudus, Menara Kudus), tth. Sebagian pendapat mengatakan bahwa syi'ir ini bukan berasal dari sahabat Ali r. a.

⁵ Karl Marx, Sosiolog. Lahir di Trier, Jerman, 1818. Teorinya yang terkenal dan sering dikutip oleh berbagai kalangan adalah tentang “konflik kelas”. Lihat Doyle Paul Johnson, terj., Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama), 1994, Cet. II.

⁶ Adam Smith, Ekonom Lahir pada 1723, pernah menjabat sebagai guru logika pada 1751, ia juga sebagai profesor moral di Glasgow, Inggris. Bukunya tentang teori pasar, *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation's*, terbit pada 1776.

Di sinilah terjadinya komersialisasi pendidikan.

Kedua, guru pembimbing (*irsyaadi ustadzin*). Ini juga merupakan hal yang wajar kalau tidak malah "harus". Sudah sewajarnya bahwa dalam kapasitas-kapasitas tertentu seseorang membutuhkan orang lain yang lebih mumpuni untuk membimbingnya pada sesuatu yang ia sendiri merasa kesulitan jika mau menyelesaikannya sendiri. Tapi lagi-lagi sayangnya syarat yang satu ini acapkali dipelintir dan disalah-tafsirkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Hubungan antara guru dan murid seringkali diproyeksikan sebagai hubungan patron-klien (hubungan atas bawah). Antara orang yang bodoh sama sekali di satu pihak. Dan orang yang mumpuni di lain pihak. Antara yang dipatuhi dan yang harus mematuhi. Bahkan dalam kredo sufistik ada adagium: "*Man lam yakun lahu syaikhun, fa syaikhuhu syaithaanun*" (barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya berarti syaitan). Dengan mengacu pada prinsip ini, semua ilmu harus didapat dan didikte dari atau di hadapan seorang guru. Ilmu yang didapat melalui otodidak boleh dibilang sebagai ilmu yang sesat atau paling tidak tidak barokah. Semuanya harus mendapat legitimasi dari seorang guru.

Kalau fenomena di atas banyak terjadi di kalangan sufistik dan

lembaga-lembaga seperti pesantren, bagaimana dengan pendidikan formal? Jawabnya tak jauh beda. Meskipun pada tataran konsep dalam lembaga-lembaga pendidikan modern seperti sekolah dan kampus-kampus sudah dinyatakan bahwa guru hanya sebagai fasilitator, tapi pada prakteknya masih banyak diantara mereka yang mengedepankan ego otoritarian-nya untuk bertindak represif pada sang murid. Nilai diantaranya terkadang dijadikan senjata ampuh untuk men-teror sang murid jika yang bersangkutan membuat guru kurang berkenan.

Di sisi lain, lembaga formal juga tak ada bedanya dengan posisi guru dalam kredo sufi. Jika dalam model yang kedua menganggap ilmu yang tidak didikte di depan guru sebagai ilmu yang tidak sah, maka lembaga formal pun telah mematok hal yang sama. Orang yang punya kapasitas keilmuan melalui jalur nonformal (otodidak misalnya atau lembaga non formal) tetap saja dianaktirikan dan dipandang sebelah mata jika tidak mendapat legitimasi dari lembaga formal. Akibatnya masyarakat kita juga ikut-ikutan gila gelar. Gelar tidak lagi dilihat sebagai tanda kualifikasi seseorang dalam ke-ilmuan tertentu. Tapi sudah tere-dukasi menjadi sebatas trend dan jaga gengsi untuk meningkatkan prestis

dan memnuhi standar tertulis dunia kerja.

Formalisasi pendidikan sedianya memang bertujuan luhur untuk menata dan meningkatkan kualitas. Tapi di sisi lain juga menimbulkan masalah-masalah baru yang cukup krusial. Kenyataan yang kita lihat sekarang, pendidikan di negeri kita menjadi barang mahal yang tidak dapat diakses oleh semua pihak.

D. Pendidikan Mengabdikan Pada Siapa?

Menurut Jurgen Habermas⁷ tak ada ilmu pengetahuan yang tidak memihak (*value free*). Ia mengkritik keras dalih kenetralan ilmu-ilmu sosiologi. Untuk itulah teori sosiologinya sering disebut dengan sosiologi kritis (*sociological criticism*). Dalih kenetralan ilmu-ilmu sosiologi disamping tidak benar adanya juga dapat dijadikan alat justifikasi untuk mendukung pihak-pihak yang menindas. Untuk itulah dari awal ia merekomendasikan bahwa semua—terutama—ilmu-ilmu sosiologi harus menentukan keperpihakannya dari

awal pada satu nilai yang diyakini bermanfaat untuk kesejahteraan umum (non diskriminatif).

Melalui kacamata ini kita dapat melihat pendidikan sebagai sesuatu yang tidak murni lagi (*education for education*). Tapi di balik itu ada motif yang mewarnai sistem pendidikan tersebut. Kaitannya dengan lembaga pendidikan formal yang *notabene* digerakkan dan *disetting* oleh pemerintah, maka pembicaraan masalah pendidikan tak lepas dari pembicaraan masalah politik. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Insiath Groome, seorang wartawan keturunan Indian yang memenangkan anugerah wartawan terbaik peliput ketertinggalan pendidikan suku-suku Indian di Amerika Serikat. Ia menyatakan, *We can't ignore the effects of politics and poverty on education*.⁸

Untuk membongkar relasi kuasa ini kiranya sangat tepat jika kita menggunakan analisa Gramscian dengan teori hegemoni-counter hegemoni-nya. Di situ ada pihak yang tertindas dan yang ditindas oleh sistem. Hegemoni bukan lagi hanya

⁷ Jurgen Habermas, filosof, lahir di Dusseldorf, 18 Juni 1929, dibesarkan di Jerman. Ia termasuk tokoh terkemuka dalam iklim intelektual Jerman dewasa ini. Lihat, Ibrahim Ali Fauzi, *Jurgen Habermas*, (Jakarta, Teraju), 2003.

⁸ Seperti dikutip Ahmad Baedhowi dalam makalahnya, *Politik Pendidikan dan Pendidikan Tak Berpolitik?*, yang disampaikan pada acara bedah buku, *"Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktek Penyelenggara Pendidikan"* karya M. Sirozi, Ph.D.

penguasaan-penguasaan pihak lain secara fisik. Tapi penguasaan secara makro dengan melibatkan perangkat-perangkat lunak sehingga pihak yang dikuasai juga tak ada kesadaran untuk melakukan perlawanan. jika pun ada *feeling* ke arah itu, mungkin sudah teramat tumpul karena kondisi ketertindasannya yang teramat parah dan membuat orang yang bersangkutan berpendapat lain bahwa segala upayanya tak akan memetik hasil. Akhirnya mereka memilih untuk membuat dunia lain. Dunia tersendiri dengan budayanya yang khas. Budaya orang-orang tertindas.

Dalam kaitan ini, pendidikan telah dijadikan alat penguasa untuk melestarikan kekuasaannya dan mendukung keinginan-keinginannya. Pendidikan telah menyimpang jauh dari maksud yang tertuang dalam *preamble* UUD 45, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Akibatnya, *wong cilik* (rakyat jelata), kehilangan akses terhadap pendidikan itu. Pendidikan menjadi elitis yang hanya memfasilitasi orang-orang berduit. Lebih ironis lagi, *wong cilik* tersebut seolah-olah frustrasi yang membuat mereka bukan hanya tak punya akses, tapi sampai

kehilangan minat belajar (*sense of education*).

Hal terakhir ini memudahkan para diktator untuk terus menggosok mereka ke pinggiran. Pembangunan terus berjalan. Sementara mereka semakin miskin dan mengengaskan terlebih karena sistimlah yang memiskinkan mereka. Mereka tidak hanya ketinggalan jaman dalam artian tampilan fisik. Tapi sampai pada taraf tak punya lagi paradigma berfikir maju (progress) dikarenakan faktor hegemonik tadi.

E. Pendidikan Untuk Kaum Miskin Kota

Pada bulan Ramadhan yang lalu, penulis mengikuti kegiatan bakti sosial dengan beberapa aktifis organisasi ekstra kampus.⁹ Bentuk kegiatannya berupa santunan pakaian pantas pakai dan sekotak nasi untuk makan sahur. Kegiatan itu sengaja ditujukan kepada kaum miskin kota.

Saat itulah penulis benar-benar sadar betapa banyak orang-orang miskin di negeri ini. Mereka tidur terlantar di sepanjang jalan yang kami lalui. Sebagian yang lain ada yang memilih kolong jembatan tol

⁹ Kegiatan ini diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ciputat, Bidang Sosial Budaya dengan mengambil tema, "Geliat Ramadhan Bersama Kaum Dhu'afa; Religius nan Ceria".

sebagai rumah tinggal mereka. Ironis. Padahal di tepi kanan kiri mereka dihiasi oleh gedung-gedung yang menjulang dan pertokoan-pertokoan mewah. Sungguh, kenyataan yang paradoks. Orang-orang seperti mereka ini jangankan memikirkan pendidikan, untuk menjawab teriakan perut keroncongan saja sudah kelimpungan. Pendidikan menjadi sosok yang tak terpikirkan. Bukan hanya sebatas sesuatu yang kurang penting (*second priority*). Terlebih karena mereka telah mati rasa dan putus asa untuk mendapat akses ke arah sana.

Pada konteks inilah hadirnya seseorang yang mampu memberikan pencerahan terhadap mereka sangat dibutuhkan. Ia adalah sosok yang – mengutip Gramsci – disebut sebagai intelektual organik. Ia adalah sosok terpelajar yang secara suka rela mau mengabdikan potensinya untuk mengadvokasi kaum miskin kota.

Intelektual tipe ini setidaknya mempunyai tiga kategori. *Pertama*, sadar akan realitas. Kesadaran ini meliputi tidak hanya apa-apa yang nampak di depan mata, tapi mencakup persoalan-persoalan kasat mata yang ada di balik peristiwa termasuk di dalamnya persoalan sistem yang hegemonik.

Kedua, mampu mentransformasikan kesadarannya pada orang lain. Faktor inilah yang memo-

tifasinya untuk turun lapangan dan melakukan advokasi-advokasi yang konkrit. Intinya adalah memberikan pendidikan dan dan penyadaran agar mereka mau dididik. Juga memberikan pengertian tentang orientasi pendidikan mereka yang mengacu pada satu cita-cita pembebasan. Kegiatan ini sifatnya fleksibel. Bisa saja dikumpulkan di suatu tempat, bergerilya diantara mereka satu per satu, ataupun teknik-teknik lain. Waktunya pun menjadi fleksibel. Pendek kata, kita harus mendekati dan merealisasikan semuanya dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis mereka.

Ketiga, mampu mengorganisir orang lain. Hal ini boleh dikata tahap klimaks dari dua proses sebelumnya. Pada kondisi ini, kaum miskin kota telah tercerahkan. Ia sadar sepenuhnya tentang kondisinya dan orang-orang yang terlibat untuk mengkondisikannya. Ia tahu siapa lawan, siapa kawan. Mereka paham bagaimana caranya berkawan dengan kawan dan bagaimana melawan lawan. Mereka tidak lagi merasa sebagai individu. Atau pun komunitas dengan paradigma fatalistik. Tapi mereka sadar (punya kesadaran kelas) yang akan mereka gunakan menjadi tali perekat satu sama lain dalam bergerak. Tahap inilah yang akan dijadikan titik pijak dimana sebuah misi akan dimulai. Sang

intelektual organik akan memulai counter hegemoni-nya kepada pihak yang menindas.

F. Penutup

Sebagai penutup, kiranya dapat penulis simpulkan beberapa hal yang menurut hemat penulis penting:

1. pendidikan merupakan faktor determinan yang menentukan jatuh bangunnya bangsa ini. Kesalahan dalam mengolah pendidikan akan melahirkan orang-orang yang justru ikut berpartisipasi dalam menghancurkan bangsa ini.
2. lepas dari masalah salah kelola pendidikan yang berdampak negatif pada bangsa ini ternyata ada fenomena yang lebih tragis. Pendidikan di negeri ini ternyata masih bersifat elitis yang mengakibatkan rakyat jelata tak
3. punya akses ke arah sana. Permasalahan yang terpenting bukan masalah mau atau tidak seseorang untuk belajar. Tapi kondisi memaksanya untuk tidak memasuki dunia itu.
3. kaum miskin kota adalah realitas obyektif. Bukannya terminologi bualan para oposan yang sentimen dengan pihak penguasa. Mereka merupakan bukti nyata dimana sebagian – besar – masyarakat kita masih tertinggal terlebih karena tak punya akses dalam masalah pendidikan.
4. oleh karena itu, kiranya sangat dibutuhkan hadirnya intelektual organik yang mau berjuang mengadvokasi mereka, mengarahkan mereka dan memberikan penyadaran, kemudian mengajak mereka untuk melakukan perubahan.□